
Realisasi anggaran pemerintah sektor pendidikan (kajian pada aspek keadilan di lembaga pendidikan madrasah)

Muh. Arif Ma'ruf^{1*}, Ara Hidayat²

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

e-mail: muhamadarifmaruf77@gmail.com

*Corresponding Author.

Received: 20 Maret 2024; Revised: 1 April 2024; Accepted: 30 April 2024

Abstract: A budget given to an area shows that the government is committed to solving problems in that area. The 20 percent education budget issued by the government becomes a problem when its realization does not match the purpose for which the budget was created. The purpose of this study is to analyze the realization of the government budget for the education sector in madrasah educational institutions in Indonesia. The area of this study is specifically on the aspect of justice in madrasah institutions including Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah and Madrasah Aliyah throughout Indonesia. A qualitative research methodology with literature study data collection was used to describe the budget realization. The results of the research on madrasah institutions, gender differences between men and women have a level of difference that is not too far away. So that the budget realization is quite appropriate. Secondly, from the Gender Parity Index, the gender gap is sufficient, all at the ideal point except at the madrasah Aliyah level where female students are 0.3 points higher than the ideal point for male students. The budget realization is quite good in this aspect of the gender gap. Third, from the private student enrollment rate, the data shows that the percentage of private students is quite large compared to public students. There needs to be high attention to access to education to provide justice for education for all.

Keywords: Government Budget; Education; Fairness; Madrasa

Abstrak: Anggaran yang diberikan kepada suatu bidang menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah di bidang tersebut. Anggaran pendidikan dikeluarkan 20 persen oleh pemerintah menjadi masalah ketika realisasinya tidak sesuai dengan tujuan anggaran itu dibuat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis realisasi anggaran pemerintah sektor pendidikan pada lembaga pendidikan madrasah di Indonesia. Area kajian ini khusus pada aspek berkeadilan di lembaga madrasah mencakup Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah se-Indonesia. Metodologi penelitian kualitatif dengan pengambilan data secara studi Pustaka digunakan untuk menggambarkan secara deskripsi mengenai realisasi anggaran. Hasil penelitian pada lembaga madrasah, perbedaan gender antara laki laki dan perempuan memiliki tingkat perbedaan yang tidak terlalu jauh. Sehingga realisasi anggarannya cukup tepat. Kedua dari Indeks Paritas Gender, memiliki kesenjangan gender yang cukup, semua di titik ideal kecuali di tingkat madrasah Aliyah pada siswa perempuan lebih tinggi 0,3 point dari titik ideal pada siswa laki-laki. Realisasi anggarannya cukup baik pada aspek kesenjangan gender tersebut. Ketiga dari Angka Partisipasi Siswa Swasta, data menunjukkan bahwa cukup besar persentase jumlah siswa swasta dibanding negeri. Perlu ada perhatian yang tinggi akan akses pendidikan untuk memberikan keadilan untuk pendidikan bagi semua.

Kata kunci: Anggaran Pemerintah; pendidikan; Keadilan; Madrasah

How to Cite: Author, F., Author, S., & Author, T. (year). The title of the manuscript should not longer than 14 words, using sentence case, Times New Roman 16pt, and centered. *Journal of Environment and Sustainability Education, Vol(Issue)*, firstpage-lastpage. <https://doi.org/10.55210/bahtsuna.v6i1.432>

Pendahuluan

Pada tahun 2020, tahun pertama pandemi COVID-19, separuh dari sampel negara yang dianalisis oleh UNESCO mengurangi pengeluaran riil tahunan untuk pendidikan. Dampak lanjutan dari pandemi

ini membuat banyak negara semakin sulit untuk mencapai tolok ukur internasional yang direkomendasikan untuk belanja pendidikan pemerintah. Tolok ukur yang umum digunakan untuk belanja pendidikan adalah mencapai 4 hingga 6 persen dari PDB dan/atau 15 hingga 20 persen dari total belanja pemerintah. Beberapa negara ada yang berhasil dan tidak. Tiga sumber utama pembiayaan pendidikan adalah pemerintah, donor, dan rumah tangga. Analisis laporan memperkirakan pengeluaran tahunan untuk pendidikan mencapai US\$4,7 triliun di seluruh dunia. Pemerintah menyumbang 79% dari total pengeluaran, rumah tangga menyumbang 20%, dan donor menyumbang 0,3% (UNESCO, 2018).

Anggaran yang begitu besar sebagian besar didanai oleh pemerintah melalui pungutan pajak, terutama di tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 membuat perencanaan dan realisasi anggaran menjadi kacau, termasuk bagaimana sektor pendidikan diambil alih untuk membiayai penanganan pandemi. Meskipun pandemi ataupun tidak, pendidikan tetap menjadi prioritas utama setelah kesehatan. Hal ini disebabkan oleh peran penting pendidikan dalam membentuk masa depan individu dan masyarakat. Selama masa pandemi, tantangan dalam sistem pendidikan semakin menonjol, seperti kesenjangan akses teknologi dan sumber daya belajar. Namun, komitmen untuk memastikan pendidikan yang berkualitas bagi semua anak tetap tidak boleh tergoyahkan. Pendidikan yang baik tidak hanya mendukung perkembangan intelektual, tetapi juga membangun karakter, keterampilan sosial, dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi perubahan. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan harus terus dilakukan secara konsisten, meskipun dalam situasi krisis sekalipun.

Banyak studi yang dilakukan di negara-negara maju dan berkembang telah menunjukkan bahwa alokasi sumber daya pemerintah yang efisien dan memadai untuk pendidikan dan kesehatan mendorong pembangunan manusia, kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi serta mengurangi beban kemiskinan (Sulasmi dkk., 2023) (Shi & Qamruzzaman, 2022) (Jung dkk., 2015). (Mukhtaruddin dkk., 2018) meneliti dampak anggaran pendidikan terhadap mutu pendidikan hasilnya secara simultan anggaran pendidikan khususnya sarana prasarana dan mutu pendidik berpengaruh positif terhadap mutu pendidikan. Dengan demikian mereka menyarankan agar pemerintah di tingkat kabupaten/kota dapat menggunakan anggaran pendidikan yang tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan, selain itu juga harus meningkatkan anggaran peningkatan mutu pendidik dan peningkatan mutu pendidik dengan baik.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Raghupathi & Raghupathi, (2020) bahwa orang dewasa dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesehatan dan harapan hidup yang lebih baik dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang berpendidikan lebih rendah. Peneliti tersebut menyoroti bahwa pendidikan tinggi, khususnya, sangat penting dalam memengaruhi angka kematian bayi, harapan hidup, vaksinasi anak, dan tingkat partisipasi pendidikan. Peningkatan pendidikan berdampak pada sikap perempuan terhadap hal-hal yang memengaruhi kesehatan perempuan dan pada sikap mengenai kekerasan terhadap perempuan (Cannonier & Mocan, 2018). Sementara itu mereka juga menemukan bahwa pendidikan membuat perempuan lebih tidak toleran terhadap praktik yang bertentangan dengan kesejahteraan mereka, peningkatan pendidikan tidak berdampak pada sikap laki-laki terhadap kesejahteraan perempuan. Mengingat betapa pentingnya pendidikan untuk membangun suatu bangsa, pembangunan SDM melalui pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Amandemen UUD 1945, terutama pasal 31, menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pendidikan nasional. Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, UUD 1945 memprioritaskan anggaran untuk pendidikan, yang harus sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rasio anggaran pendidikan terhadap total belanja APBN selalu lebih besar dari 20% dari APBN sejak tahun 2009 (Christianingrum, 2018).

Menurut (Mangkoesebroto, 2016) kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tercermin dalam pengeluaran pemerintah. Biaya harus ditanggung oleh pemerintah yang menetapkan kebijakan tertentu. Biaya tersebut berasal dari anggaran pemerintah, yang merupakan biaya yang ditanggung oleh

pemerintah. Anggaran yang diberikan kepada suatu bidang menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah di bidang tersebut. Hal ini berarti Indonesia memiliki komitmen yang tinggi terhadap masalah pendidikan dengan tercermin dari porsi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.

Kualitas pendidikan harus dipahami sebagai proses terarah yang memberikan skenario optimal bagi perkembangan proses belajar-mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan (Barba Miranda & Delgado Vadivieso, 2021) dan sebagai gabungan dari elemen-elemennya (Serrano Rodríguez dkk., 2023). Secara fungsional, pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk menyiapkan manusia menghadapi masa depan agar hidup lebih sejahtera, baik sebagai individu maupun secara kolektif sebagai warga masyarakat, bangsa maupun antar bangsa (Mubarak, 2004). Pencapaian suatu negara dalam pendidikan mencerminkan integrasi seluruh elemen yang bergerak menuju tujuan pendidikan yang telah ditetapkan negara.

Pemerintah Indonesia melalui Kemendikbud pada tahun 2018 merilis indikator pendidikan untuk yang diuraikan melalui misi-misi pendidikan. Berdasarkan tantangan yang dihadapi pada abad ke-21, upaya pembangunan pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan yang lebih berat dalam menyiapkan kualitas SDM. Tantangan tersebut terasa semakin berat sejak adanya otonomi pendidikan karena tidak semua kabupaten/kota mampu memberikan data yang valid dan terpercaya ke pusat. Kebijakan pembangunan pendidikan dapat dibagi menjadi lima misi pendidikan dan kebudayaan untuk mengikuti perkembangan keadaan pembangunan pendidikan dari segi ukuran, kemampuan, dan kepentingan sistem pendidikan (Kemendikbud, 2018).

Misi pendidikan terdiri atas M1 adalah mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat, M2 adalah mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan, M3 adalah mewujudkan pembelajaran yang bermutu, M4 adalah mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa, dan M5 adalah mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik. Selain itu, disajikan pula indikator penunjang. indikator pendidikan yang dibuat tersebut dibatasi pada indikator yang benar-benar dapat menggambarkan situasi pendidikan di Indonesia. Keadilan merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat dan eksperimen ekonomi telah menunjukkan bahwa masyarakat biasanya menganggap ketidaksetaraan karena keberuntungan sebagai hal yang tidak adil meskipun ada beberapa pendapat dari orang-orang di berbagai negara yang berpendapat sebaliknya (Cappelen dkk., 2021). Maka negara harus memastikan keadilan terlaksana dalam segala penyelenggaraan pemerintah termasuk bidang pendidikan.

Pendidikan yang adil memberikan keadilan sosial bagi masyarakat, menjadi bagian penting dari masyarakat, dan membuat pikiran mereka terbuka untuk perilaku dan keadilan (Kiran & Kumari, 2016). pendidikan yang adil memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi dan mencapai potensi terbaik mereka. Selaras dengan UU Republik Indonesia No 20 tentang SPN tahun 2003 Pasal 5 ayat 1, bahwa "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu". Akses universal terhadap pendidikan menjadi perhatian besar seperti UNESCO yang merumuskan pendidikan untuk semua atau "*Education for All*" dan menghasilkan rumusan tujuan untuk mencapai hal itu yaitu memperluas dan meningkatkan perawatan dan pendidikan anak usia dini, memastikan semua anak memiliki akses ke pendidikan dasar yang bermutu, gratis, dan wajib kemudian menghilangkan kesenjangan gender dalam pendidikan dasar dan menengah, mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan, memastikan bahwa kebutuhan belajar semua orang muda dan orang dewasa terpenuhi melalui akses yang adil ke program pembelajaran dan keterampilan hidup yang sesuai, mencapai peningkatan 50% dalam tingkat literasi orang dewasa, terutama bagi perempuan, dan menawarkan akses yang adil ke pendidikan dasar dan berkelanjutan untuk semua orang dewasa, dan terakhir meningkatkan semua aspek kualitas pendidikan (Brundrett, 2014).

Keadilan bertujuan memberi hak pada setiap warga negara untuk mengakses pendidikan, mengakui keragaman, dan tidak mendiskriminasi seseorang. Kemendikbud menguraikan aspek keadilan kedalam 3 indikator dan ini menjadi tolak ukur penelitian yaitu : 1) perbedaan gender Angka Partisipasi Kasar (PG APK), 2) Indeks Paritas Gender APK (IPG APK), dan 3) persentase siswa swasta atau bisa ditulis %S-Swt (Kemendikbud, 2018).

Angka Partisipasi Kasar (APK) atau Gross Enrollment Ratio (GER) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Indikator ini mengindikasikan partisipasi sekolah penduduk pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan usia (Rahmadina dkk., 2021). Perbedaan Gender atau *Gender Disparity* adalah Selisih antara jumlah APK laki-laki dengan APK perempuan pada jenjang pendidikan tertentu yang dinyatakan dalam persentase (Kemendikbud, 2018). Sedangkan Indeks Paritas Gender atau *Gender Parity Index* adalah indeks sosioekonomi yang biasanya dirancang untuk mengukur akses relatif terhadap pendidikan laki-laki dan Perempuan (UNESCO, 2006) atau Perbandingan antara APK perempuan dengan APK laki-laki pada jenjang pendidikan tertentu (Kemendikbud, 2018).

Data indikator pendidikan yang pernah dikeluarkan yaitu oleh Kemendikbud pada tahun 2018, berisikan data-data statistik mengenai ketercapaian misi-misi kemendikbud. Sedangkan data statistik untuk sekolah/madrasah dibawah Kementerian Agama belum ada secara 3 indikator diatas mengenai aspek keadilan. Karena sekolah/madrasah di bawah Kemenag cukup banyak. Menurut situs Emis Kemenag, hingga semester genap tahun pelajaran 2022/2023, jumlah RA dan Madrasah di Indonesia mencapai 86.608 lembaga dan seharusnya sudah bisa diukur tingkat realisasi anggarannya. Pengeluaran publik yang efektif untuk pendidikan sangat penting karena sumber daya terbatas dan pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk mempertahankan pembangunan ekonomi, dan dengan demikian meningkatkan standar hidup dan pembangunan manusia. Maka peneliti tertarik untuk menguraikan "Realisasi Pengeluaran Pemerintah Sektor pendidikan", khusus dalam lingkup sekolah dibawah kementerian agama se-Indonesia dan dalam aspek keadilan menurut Kemendikbud.

Metode

Metode pada artikel ini menggunakan metode kualitatif dan pengambilan datanya menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai pengolahan informasi dari berbagai sumber, seperti surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, hadiah, jurnal kegiatan, dan sebagainya (Murdiyanto, 2020). Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam konteks dan dinamika di balik realisasi anggaran. Ini penting untuk mengetahui bagaimana anggaran digunakan, tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap lembaga madrasah. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah dengan analisis konten untuk mengidentifikasi tema utama dan kemudian menggunakan analisis tematik untuk menggali lebih dalam hubungan antar tema tersebut. Analisis konten ini digunakan untuk menganalisis artikel jurnal, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan terkait dengan anggaran pemerintah. Sedangkan analisis tematik digunakan mengelompokkan tema-tema penting yang muncul dari data. Teknik ini membantu memahami konteks yang lebih luas dan narasi yang mendasari serta bisa menyederhanakan pembahasan penelitian.

Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan mengkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka utama yaitu EMIS yang merupakan suatu sistem pendataan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama berupa website <https://emis.kemenag.go.id/> untuk pengambilan data peserta didik tahun ajaran 2022/2023 serta laporan APBN dari tahun ke tahun khususnya anggaran pendidikan yang diambil dari Kementerian Keuangan berupa website <https://data-apbn.kemenkeu.go.id>, dan dari data tersebut yang dianalisis yaitu perkembangan selama 5 tahun dari 2018 sampai 2022. Sumber primer dari kedua

kementerian tersebut diambil karena merupakan otoritas resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, Data dan informasi yang dikeluarkan oleh kementerian telah melalui berbagai prosedur validasi dan verifikasi yang ketat. Hal tersebut memastikan bahwa data tersebut akurat dan dapat dipercaya.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap realisasi pembiayaan di madrasah, yang merupakan salah satu aspek krusial dalam pengelolaan pendidikan Islam. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana alokasi dana digunakan dan dikelola secara berkeadilan untuk memenuhi kebutuhan operasional, pengembangan fasilitas, serta peningkatan kualitas pendidikan di madrasah dan hasilnya dilihat dari aspek keadilan dibahas beberapa poin yaitu Data Porsi APBN, Perbedaan Gender *APK/Gender Disparitas*, Indeks Paritas Gender *APK/ Gender Parity Indeks*, dan Angka Partisipasi Siswa Swasta/*Private Pupils Participant Rate*.

Data Porsi APBN

Porsi APBN atau pengeluaran pemerintah dari tahun ke tahun secara nominal terus mengalami kenaikan. Kenaikan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan nasional, termasuk sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Peningkatan anggaran juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengatasi berbagai tantangan sosial-ekonomi, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Terkhusus dalam sektor pendidikan, pemerintah membagi porsi sebesar 20 persen sudah sesuai dengan amanat undang-undang dan hasil ratifikasi UNESCO mengenai anggaran pendidikan ideal suatu negara. Meskipun ada 2 tahun tidak mencapai 20 persen tapi hampir mendekati angka tersebut. Berikut data porsi APBN, APBN Sektor pendidikan dan porsi sektor pendidikan untuk Kementerian Agama.

Tabel 1. Data Porsi APBN Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah)

Tahun	APBN	Sektor pendidikan	Rasio Sektor Pendidikan terhadap APBN	Sektor pendidikan untuk Kemenag
2018	2.213.117.800	431.733.400	19.5 %	50.001.900
2019	2.304.268.600	460.316.800	20.0 %	52.719.600
2020	2.593.534.900	473.658.800	18.3 %	58.496.200
2021	2.750.028.000	550.005.600	20.0 %	55.885.500
2022	2.714.155.700	542.831.900	20.0 %	55.858.800

Sumber: Diolah Peneliti dari Kemenkeu (2023)

Dalam 5 tahun terakhir cukup stabil dari segi porsi pembiayaan pendidikan melalui APBN. Sedikit menurun terjadi di tahun 2020 berdasarkan rasio sektor pendidikan terhadap APBN yaitu sebesar 18.3 %, menurun 1.7 % dari tahun sebelumnya. Meskipun secara nominal semua sektor meningkat dari tahun sebelumnya tapi jika dilihat dari rasio itu menurun. Hal itu terjadi karena bertepatan dengan Pandemi Covid-19 terjadi secara global yang berdampak pada relokasi anggaran untuk penanganan pandemi tersebut. Meski menurun di tahun tersebut, pemerintah berusaha untuk membuat sektor pendidikan tetap stabil. Jika dilihat dari nominalnya, anggaran pendidikan terus menerus meningkat dan dalam 5 tahun paling tinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 550 triliun rupiah. Hal ini diakibatkan kepentingan pemerintah untuk memulihkan sektor pendidikan pasca pandemi. Jadi perlu anggaran yang cukup besar untuk meningkatkan kualitas sektor pendidikan.

Joko Widodo selaku presiden Republik Indonesia ketika acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 di Istana Negara, pada Rabu, 25 November 2020, menyebutkan bahwa

“Fokus yang keempat yakni membangun fondasi yang lebih kuat dengan melakukan reformasi struktural baik di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan lain sebagainya”.

Kemudian menyebutkan juga “Kesehatan sebesar Rp169,7 triliun, pendidikan Rp550 triliun, infrastruktur Rp417,4 triliun, perlindungan sosial Rp408,8 triliun, ketahanan pangan Rp99 triliun, pembangunan bidang teknologi dan informasi Rp26 triliun, dan seterusnya,”

Dengan fokus utama Kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional, tetap saja pendidikan mendapat perhatian penting dengan dianggarkannya paling tinggi dari sektor yang lain. Berdasarkan data tersebut maka seharusnya kualitas sektor pendidikan bisa meningkat karena mendapat porsi lebih dari yang lain. Hal yang unik dari data yang ditemukan bahwa anggaran untuk Kementerian agama secara khusus untuk pendidikan terjadi pada tahun 2020 dimana ketika covid terjadi, secara nasional anggaran menurun, tapi kementerian agama justru mengalami kenaikan sekitar 6 triliun.

“Anggaran Kemenag kelihatan lebih besar karena itu anggaran untuk satker pusat sampai daerah. Sementara anggaran Kemendikbud itu hanya untuk membiayai satker pusat saja,” jelas Mastuki Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag.

*“Anggaran yang dikelola Kementerian Agama untuk pendidikan lebih besar dari Kementerian pendidikan dan Kebudayaan, karena Kementerian pendidikan Tinggi dan Ristek sudah dipisah”*ucap Ketua KPK Laode M. Syarif.

Hal ini menunjukkan bahwa terjadi karena perbedaan struktural dan tugas dari lembaga-lembaga tersebut.

Peningkatan-peningkatan nominal porsi anggaran sektor pendidikan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Apakah berbanding lurus dengan peningkatan sarana prasarana, peserta didik, pendidik?. Menjawab pertanyaan tersebut, realisasi anggaran bisa ditinjau dari berbagai aspek, salahsatunya aspek berkeadilan atau *fairness*. Aspek ini ditinjau dari 3 faktor yaitu tingkat Perbedaan Gender, Indeks Paritas Gender dan Rasio Siswa Swasta.

Perbedaan Gender APK/Gender Disparitas

Gender disparitas adalah ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, politik, dan kesehatan. Gender disparitas dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti diskriminasi, ketimpangan akses dan kesempatan, dan stereotip gender. Memahami produktivitas dan dampak berdasarkan gender dan identitas lainnya penting untuk mengidentifikasi hambatan yang terus berlanjut terhadap inklusi dan kemajuan individu yang terpinggirkan, tetapi juga karena metrik ini menjadi dasar dari sistem penghargaan saat ini (Penaluna & Arismendi, 2022).

Gender disparitas dalam pendidikan dapat terlihat dari perbedaan akses dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Misalnya, di beberapa daerah, perempuan masih memiliki akses yang terbatas ke pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, perempuan juga sering dihadapkan pada stereotip gender yang membatasi pilihan kariernya. Perbedaan Gender APK/Gender Disparitas adalah Selisih dari APK Laki-laki dan APK Perempuan pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Maka rumusnya adalah sebagai berikut (Kemdikbud, 2018).

$$PG\ APK = APK\ Laki-laki - APK\ Perempuan\ jenjang\ pendidikan\ tertentu$$

Maka data perhitungannya adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Perbedaan Gender APK/Gender Disparity 2023

Jenjang pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)		
	Laki-laki	Perempuan	PG APK
MI/Madrasah Ibtidaiyah	105.84	105.39	0.45 %
MTs/Madrasah Tsanawiyah	92.59	92.43	0.16 %
MA/Madrasah Aliyah	83.49	89.31	-5.82 %

Sumber: Diolah Peneliti (2023)

Berdasarkan data tersebut bahwa tingkat perbedaan gender berdasarkan Angka Partisipasi Kasar (PG APK) di tiap jenjang mengalami perbedaan. Gender Disparitas/Perbedaan Gender merepresentasikan ketidakadilan gender, hal ini bukan merupakan fenomena homogen namun merupakan kumpulan disparitas dari berbagai permasalahan yang berkaitan. Pada madrasah Ibtidaiyah atau setara sekolah dasar, angka perbedaan gendernya adalah 0.45 %. Artinya ada gap/kesenjangan antara akses pendidikan yang diterima laki-laki lebih besar 0.45 % dibanding Perempuan secara jumlah. Begitupun dengan Madrasah Tsanawiyah setara Sekolah Menengah Pertama sebesar 0.16 % dan Madrasah Aliyah sebesar -5.82 %.

Angka Partisipasi Kasar adalah Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Artinya bahwa masih cukup banyak anak-anak yang tidak bersekolah bahkan secara gender, Perempuan lebih rendah akses pendidikannya dibanding laki-laki pada tingkat MI dan MTs. Angka ini masih cukup baik karena tidak memiliki kesenjangan yang tinggi. Sedangkan pada Madrasah Aliyah memiliki angka yang cukup tinggi, laki-laki lebih rendah akses pendidikannya dibanding perempuan. Pemerintah perlu meninjau ulang realisasi anggaran dengan meningkatkan partisipasi siswa laki-laki pada madrasah Aliyah sehingga memiliki akses pendidikan yang layak. Fenomena ini mencerminkan tantangan yang kompleks dalam mencapai kesetaraan gender di lembaga pendidikan Islam tingkat menengah atas. Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap kesenjangan ini termasuk persepsi sosial tentang peran gender, tekanan ekonomi yang memprioritaskan anak perempuan dalam pendidikan, dan kurangnya dukungan untuk anak laki-laki dalam mengakses dan menyelesaikan pendidikan. Mengatasi disparitas ini memerlukan pendekatan holistik yang mencakup peningkatan kesadaran masyarakat, penyediaan beasiswa dan bantuan keuangan, serta penciptaan lingkungan belajar yang mendukung untuk semua gender.

Indeks Paritas Gender APK/Gender Parity Index

Indeks Paritas Gender adalah indeks sosial-ekonomi yang dirancang untuk mengukur akses relatif terhadap pendidikan bagi anak laki-laki dan perempuan. Indeks ini menekankan pada perlakuan yang egaliter berdasarkan gender, dalam hal ini dalam hal pendaftaran pendidikan dasar (Kundu & Biswas, 2019). Orang-orang yang berpendidikan merupakan aset negara mana pun. Laporan Tahunan PBB (2016) menyatakan bahwa memberikan pendidikan kepada perempuan adalah cara terbaik untuk meningkatkan status dan kondisi perempuan serta kesejahteraan ekonomi keluarga. Salah satu Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) dan Tujuan pendidikan untuk Semua adalah kemajuan menuju kesetaraan gender dalam sekolah.

Indeks Paritas Gender APK adalah perbandingan antara APK Perempuan dengan APK Laki-laki pada jenjang pendidikan tertentu (Kemdikbud, 2018). Maka rumusnya adalah sebagai berikut.

$$IPG\ APK = \frac{APK\ Perempuan\ jenjang\ pendidikan\ tertentu}{APK\ Laki-laki\ jenjang\ pendidikan\ tertentu}$$

Maka data perhitungannya adalah sebagai berikut.

Table 3. Indeks Paritas Gender APK/Gender Parity Index GER 2023

Jenjang pendidikan	Indeks Paritas Gender APK		
	Laki-laki	Perempuan	IPG APK
MI/Madrasah Ibtidaiyah	105.84	105.39	0.99
MTs/Madrasah Tsanawiyah	92.59	92.43	0.99
MA/Madrasah Aliyah	83.49	89.31	1.06

Sumber: Diolah Peneliti dari BPS (2023)

Menurut UNESCO, IPG adalah Rasio nilai perempuan terhadap laki-laki dari suatu indikator tertentu. GPI antara 0,97 dan 1,03 menunjukkan kesetaraan antar gender. GPI di bawah 0,97 menunjukkan disparitas yang lebih menguntungkan laki-laki. GPI di atas 1,03 menunjukkan adanya kesenjangan yang memihak Perempuan (UNESCO, 2022). Bisa dilihat bahwa data tiap jenjang pendidikan memiliki rasio yang hampir sama. Hanya ada perbedaan di tingkat Madrasah Aliyah yaitu sebesar 1.06.

Pada tingkat Madrasah Ibtidaiyah setara Sekolah Dasar dan Madrasah Tsanawiyah setara Sekolah Menengah Pertama, angka IPG nya adalah 0.99 yaitu diatas 0.97 dan dibawah 1.03. artinya Indeks Paritas Gender pada MI dan MTs memiliki indeks yang ideal. Hal ini menunjukan bahwa terjadi akses pendidikan yang berkeadilan dilihat dari rasio gender yang ideal. Jika suatu negara memiliki Indeks Paritas Gender (IPG) yang ideal, maka berarti tidak ada diskriminasi gender dalam sektor pendidikan. Hal ini berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk mencapai potensi penuh mereka. Tapi pada tingkat madrasah Aliyah setara dengan Sekolah Menengah Atas memiliki nilai 1.06 artinya diatas 1.03. hal itu menunjukan bahwa perempuan memiliki lebih banyak kesempatan daripada laki-laki dalam bidang pendidikan. Perempuan memiliki akses yang lebih tinggi ke pendidikan berkualitas daripada laki-laki. Misalnya, perempuan akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesenjangan ini mungkin termasuk kebijakan afirmatif yang mendukung pendidikan perempuan, persepsi sosial yang lebih mendukung pendidikan bagi anak perempuan, serta program-program khusus yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan. Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan upaya yang menyeluruh, termasuk pemberian dukungan yang lebih besar bagi anak laki-laki, peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi semua gender, dan penciptaan lingkungan pendidikan yang inklusif dan adil.

Angka Partisipasi Siswa Swasta/Private Pupils Participant Rate

Angka partisipasi siswa swasta pada sebuah negara menunjukkan persentase siswa yang bersekolah di sekolah swasta dibandingkan dengan jumlah total siswa di negara tersebut. Angka ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi siswa swasta dalam pendidikan di negara tersebut. Semakin tinggi angka partisipasi siswa swasta, semakin banyak siswa yang bersekolah di sekolah swasta dan semakin besar peran sekolah swasta dalam sistem pendidikan negara tersebut. Angka tersebut juga menunjukkan data tentang tingkat keterjangkauan pendidikan swasta, minat masyarakat terhadap pendidikan swasta, dan kualitas pendidikan swasta. Partisipasi siswa swasta yang tinggi menunjukkan bahwa pendidikan swasta lebih terjangkau dan lebih diminati oleh masyarakat daripada pendidikan negeri. Di sisi yang lain, bisa disebabkan karena jumlah sekolah negeri tidak memadai untuk menampung sehingga Masyarakat menggunakan pihak swasta untuk bersekolah. Tentu banyak factor yang menjadi angka partisipasi ini rendah atau tinggi.

Dilansir dari Ayomadrasah.com, pada tahun 2023, dari 55.535 madrasah (tidak termasuk RA), sebanyak 92,7% (51.507 madrasah) merupakan madrasah berstatus swasta. Sedang jumlah madrasah Negeri hanyalah 4.046 atau setara dengan 7,3% saja. Artinya ketersediaan akses pendidikan madrasah negeri sangat rendah. Jadi masyarakat lebih banyak mengakses madrasah swasta. Bisa ditinjau dari dua

sisi bahwa tinggi dan rendahnya partisipasi siswa swasta bisa dari kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan swasta atau dari jumlah sekolah negeri yang tidak memadai.

Mengetahui Angka Partisipasi Siswa Swasta dilihat dari persentase jumlah siswa swasta terhadap siswa seluruhnya pada jenjang pendidikan tertentu (Kemdikbud, 2018). Maka rumusnya adalah sebagai berikut.

$$\%S - Swt = \frac{\text{Jumlah Siswa Swasta pada jenjang pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah Siswa Seluruhnya pada jenjang pendidikan tertentu}} \times 100$$

Maka data perhitungannya adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Angka Partisipasi Siswa Swasta/Private Pupils Participant Rate 2022/2023

Jenjang pendidikan	Siswa Swasta	Siswa Seluruhnya	Persentase
MI/Madrasah Ibtidaiyah	3.555.639	4.225.644	84.14 %
MTs/Madrasah Tsanawiyah	2.001.122	3.309.320	60.47 %
MA/Madrasah Aliyah	1.807.643	1.581.490	54.23 %

Sumber: Diolah Peneliti dari Emis Kemenag (2023)

Berdasarkan data tersebut angka partisipasi siswa swasta di setiap jenjang pendidikan memiliki nilai yang cukup tinggi, semuanya diatas 50 persen. Partisipasi siswa swasta yang tinggi menunjukkan bahwa pendidikan swasta lebih terjangkau dan lebih diminati oleh masyarakat daripada pendidikan negeri. Hal ini dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tanpa memandang status sosial ekonominya.

Menurut *right-to-education.org*, Tingginya tingkat indikator ini dapat mengindikasikan buruknya kualitas pendidikan di sekolah negeri, yang biasanya berdampak buruk pada anak-anak miskin, yang keluarganya seringkali tidak mampu membayar biaya sekolah swasta. Selain itu, persentase yang meningkat dari waktu ke waktu dari pendaftaran sekolah swasta pada tingkat pendidikan tertentu dapat menjadi indikasi memburuknya kualitas pendidikan di sekolah negeri. Hal ini penting karena perbedaan yang tinggi dalam tingkat pendaftaran di dalam dan di antara kelompok-kelompok dapat menjadi indikasi adanya diskriminasi dalam akses ke pendidikan swasta untuk kelompok-kelompok tertentu.

Dilihat dari data tabel 4 diatas, persentase yang cukup tinggi mengindikasikan adanya ketidakadilan akses pendidikan sehingga banyak masyarakat yang menyekolahkan ke swasta. Ketidakadilan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk persepsi sosial, kebijakan pendidikan yang kurang merata, serta keterbatasan fasilitas dan sumber daya di madrasah. Akibatnya, banyak keluarga memilih sekolah swasta yang dianggap mampu memberikan pendidikan yang lebih baik dan akses yang lebih adil bagi anak-anak mereka. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di madrasah, sehingga dapat menyediakan kesempatan yang setara bagi semua siswa tanpa memandang gender. Dilihat dari postur anggaran sektor pendidikan yang cukup besar, realisasinya perlu untuk ditinjau Kembali untuk meningkatkan keadilan akan akses pendidikan. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tanpa memandang status sosial ekonominya.

Kesimpulan

Realisasi anggaran sektor pendidikan perlu ditinjau untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran itu tepat sasaran dan menjangkau kesetiap lapisan Masyarakat. Realisasi anggaran dari aspek berkeadilan ditinjau dari 3 indikator. Pertama Perbedaan Gender/Gender disparitas dalam pendidikan

dapat terlihat dari perbedaan akses dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Secara umum pada lembaga madrasah, perbedaan gender antara laki laki dan Perempuan memiliki tingkat perbedaan yang tidak terlalu jauh. Sehingga realisasi anggarannya cukup tepat.

Kedua dari Indeks Paritas Gender, di lembaga madrasah memiliki kesenjangan gender yang tidak tinggi, semua di titik ideal kecuali di tingkat madrasah Aliyah pada siswa perempuan lebih tinggi 0,3 point dari titik ideal pada siswa laki-laki. Realisasi anggarannya cukup baik pada aspek kesenjangan gender tersebut. Ketiga dari Angka Partisipasi Siswa Swasta, data menunjukkan bahwa cukup besar persentase jumlah siswa swasta dibanding negeri. Realisasi anggaran terutama sekolah yang dibawah kementerian agama perlu ada perhatian yang tinggi akan akses pendidikan dengan meningkatkan pendaftaran siswa pada sekolah negeri sehingga negara mampu memberikan keadilan untuk pendidikan bagi semua.

Keterbatasan penelitian ini adalah indikator aspek berkeadilan hanya didasarkan pada tiga indikator yang dirilis oleh Kemendikbud pada tahun 2018. Aspek berkeadilan dalam pendidikan sangatlah luas, tidak hanya dari berbagai faktor. Keadilan dalam pendidikan mencakup berbagai aspek, seperti: Akses dan kesempatan, aspek Ekuitas, Kemandirian dan aspek yang lainnya. Perlu untuk peneliti berikutnya mengambil indikator dari sudut pandang yang lain sehingga bisa memberi gambaran yang komprehensif.

Referensi

- Barba Miranda, L. C., & Delgado Vadivieso, K. E. (2021). Gestión escolar y liderazgo del directivo: Aporte para la calidad educativa. *Revista EDUCARE - UPEL-IPB - Segunda Nueva Etapa 2.0*, 25(1 SE-Informes de Investigación Cuantitativa o Cualitativa), 284–309. <https://doi.org/10.46498/reduipb.v25i1.1462>
- BPS. (2023). *Statistik Indikator Pendidikan*. Diakses pada 25 Desember 2023 dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table?subject=521>
- Brundrett, M. (2014). Education for all: the challenges of achieving universal early childhood care and primary education. *Education 3-13*, 42(3), 233–236. <https://doi.org/10.1080/03004279.2014.912911>
- Cannonier, C., & Mocan, N. (2018). The Impact of Education on Women's Preferences for Gender Equality: Evidence from Sierra Leone. *Journal of Demographic Economics*, 84(1), 3–40. <https://doi.org/10.1017/dem.2016.12>
- Cappelen, A. W., Falch, R., Sørensen, E., & Tungodden, B. (2021). Solidarity and fairness in times of crisis. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 186, 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.03.017>
- Christianingrum, R. (2018). The Effect Of Education Budgets On Indonesian Education Development Ratna Christianingrum. *Jurnal budget*, 3(2), 64–98.
- Jung, S., Cho, S. H., & Roberts, R. K. (2015). The impact of government funding of poverty reduction programmes. *Papers in Regional Science*, 94(3), 653–675. <https://doi.org/10.1111/pirs.12089>
- Kemdikbud. (2018). *Indikator Pendidikan Di Indonesia, Education Indicators in Indonesia Tahun 2017/2018*. 107.
- Kemenag. (2023). *Data Statistik RA & Madrasah 2022/2023 Semester Genap*. Diakses pada 25 Desember 2023 dari <http://infopublik-emis.kemenag.go.id/?ta=2022%2F2023+Genap>
- Kemenkeu. (2022). *Anggaran Pendidikan*. Diakses pada 25 Desember 2023 dari <https://data-apbn.kemenkeu.go.id/lang/id/post/10/anggaran-pendidikan>
- Kiran, M., & Kumari, M. R. (2016). Higher Education : Equity , Access & Excellence. *Bhartiyam International Journal of Education & Research*, 5(Iv), 51–58.
- Kundu, A., & Biswas, P. (2019). *Gender parity index in primary school in rural India: An analysis*. 6(2). www.kspjournals.org
- Mangkoesebroto, G. (2016). *Ekonomi Publik* (3 ed.). BPFE-Yogyakarta.
- Mubarak, F. (2004). Faktor dan Indikator Mutu Pendidikan Islam. *Management of Education*, 1(1), 10–18. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/moe/article/view/342/258>
- Mukhtaruddin, Muhammad, S., Masbar, R., & Nasir, M. (2018). *International Journal of Economics*,

- Commerce and Management Effect Of Educational Budget And Educational Quality To Education Quality Case Study On The Senior High School (SMA). *International Journal of Economics, Commerce and Management*, VI(4), 141–153. <http://ijecm.co.uk/>
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. LP2M UPN Veteran Yogyakarta Press.
- Penaluna, B. E., & Arismendi, I. (2022). The Gender Gap: Women as Authors and Leaders in International Publications in Fisheries Science. In *Encyclopedia of Inland Waters, Second Edition* (2 ed., Vol. 4). Elsevier Inc. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819166-8.00162-6>
- Raghupathi, V., & Raghupathi, W. (2020). The influence of education on health: An empirical assessment of OECD countries for the period 1995-2015. *Archives of Public Health*, 78(1), 1–18. <https://doi.org/10.1186/s13690-020-00402-5>
- Rahmadina, R. P., Ratna, M., & Budiantara, I. N. (2021). Pemodelan Faktor yang Memengaruhi Angka Partisipasi Kasar SMA/ sederajat di Papua Menggunakan Regresi Nonparametrik Spline Truncated. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 9(2). <https://doi.org/10.12962/j23373520.v9i2.54873>
- Serrano Rodríguez, R., Pérez Gracia, E., Puño-Quispe, L., & Hurtado Mazeyra, A. (2023). Quality and equity in the Peruvian education system: Do they progress similarly? *International Journal of Educational Research*, 119(November 2022). <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2023.102183>
- Shi, Z., & Qamruzzaman, M. (2022). Re-Visiting the Role of Education on Poverty Through the Channel of Financial Inclusion: Evidence From Lower-Income and Lower-Middle-Income Countries. *Frontiers in Environmental Science*, 10(May), 1–17. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.873652>
- Sulasmu, E., Prasetia, I., & Rahman, A. A. (2023). Government Policy Regarding Education Budget on The Posture of The State Budget (APBN). *Journal for Lesson and Learning Studies*, 6(1), 142–151. <https://doi.org/10.23887/jlls.v6i1.60171>
- UNESCO. (2006). *Education for All (EFA) in least developed countries*. UNESCO Institute for Statistics. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000147259.locale=en>
- UNESCO. (2018). *Global education monitoring report, 2019: Migration, displacement and education: building bridges, not walls*. <https://doi.org/https://doi.org/10.54676/XDZD4287>
- UNESCO. (2022). *Gender parity index (GPI) | UNESCO UIS*. UNESCO Institute for Statistics. <http://uis.unesco.org/en/glossary-term/gender-parity-index-gpi>